

## EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA KUPEN, KECAMATAN PRINGSURAT, KABUPATEN TEMANGGUNG

Wahyu Ripwanto, Faizatul Ansoriyah

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas sebelas  
Maret

Email: Wahyuripwanto@student.uns.ac.id

### Abstrak

Rumah menjadi unit bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian sekaligus sarana pembinaan keluarga. Serta rumah yang layak huni menjadi kebutuhan pokok bagi manusia untuk berlindung. Salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup adalah mencapai standar rumah layak huni. Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan kenyamanan. Kriteria tersebut melibatkan aspek-aspek seperti keselamatan, kecukupan ruang, dan kesehatan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program pemerintah yang tercantum pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2018, kebijakan ini guna untuk menstimulan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni, serta menuntut keswadyaan penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari program kebijakan ini yang dilaksanakan di Desa Kopen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dari menurut Miles dan Huberman (1992) dengan tiga alur kegiatan (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) dan penarikan simpulan. Hasil temuan di lapangan dari penelitian ini a) peningkatan kualitas rumah layak huni terbangun 100%, b) keberlanjutan program akan ada replikasi dan duplikasi oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung menggunakan anggaran daerah, c) verifikasi penerima manfaat sudah *by name by adress*, d) masyarakat mampu untuk swadaya dalam proses pembangunan rumah layak huni dan ada partisipasi masyarakat untuk gotong-royong atau “sambatan”.

**Kata kunci:** efektivitas, BSPS, Swadaya

### Abstract

A house serves as a building unit that functions as a place of residence or dwelling and also as a means for family development. A habitable house is a basic human need for shelter. One of the key elements in improving the quality of life is achieving the standard of a habitable house. A habitable house is a residence that meets certain standards in terms of quality and comfort. These criteria involve aspects such as safety, adequate space, and health. The government has issued the Self-Help Housing Stimulant Assistance (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) policy, a program included in the Regulation of the Minister of Public Works and Housing (Permen PUPR) Number 7/PRT/M/2018. This policy aims to stimulate low-income communities to meet their needs for habitable housing while demanding self-reliance from the beneficiaries. This study aims to determine the effectiveness of this policy program implemented in Kopen Village, Pringsurat Subdistrict, Temanggung Regency. The research method used is descriptive qualitative, conducted through interviews, observations, and documentation. Data analysis follows the model by Miles and Huberman (1992) with three activities: (1)

data reduction, (2) data presentation, and (3) drawing conclusions. The field findings of this study are: a) 100% improvement in the quality of habitable houses, b) program sustainability with replication and duplication by the DPRKPLH of Temanggung Regency using regional budgets, c) verification of beneficiaries is already by name by address, and d) the community is capable of self-help in the construction process of habitable houses, with community participation in mutual cooperation or "sambatan."

**Keywords:** effectivity, BSPS, self-help

## **Pendahuluan**

Tempat tinggal atau disebut rumah adalah salah satu unit bangunan yang krusial sebagai tempat tinggal atau hunian, di sisi lain rumah juga bisa sebagai sarana pembinaan keluarga (Sunarti, 2019:6). Di Indonesia pada dasarnya bahwa kegiatan dalam proses pembangunan pada era sebelumnya lebih berorientasi pada kecepatan pertumbuhan ekonomi secara instan, namun realitas yang ada masih meninggalkan sedikit problem pada keadaan masyarakat. Beberapa masalah yang mengharuskan adanya langkah pemecahan masalah yang komprehensif antara kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah selaku pemangku kebijakan senantiasa berusaha dan berikhtiar terus untuk memprakarsai berbagai program pembanguan untuk penanggulangan kemiskinan yang sebanding berdasarkan pertimbangan yang logis,serta berupaya untuk meminimalisir efek negatif sebagai dampak suatu program penanggulangan kemiskinan.

Esensi dari konsep partisipasi masyarakat merupakan mengikutsertakan, melibatkan, dan meseragamkan bagian elemen dalam masyarakat mulai dari perumusan, penyaluran gagasan, hingga pengambilan keputusan final baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat dapat mengambil peran sebagai perantara atau wakil dari tindakan atau program yang dilakukan pemerintah dapat memberikan kontribusi dan memengaruhi rangkaian proses pembangunan serta secara kolektif dan penerapan mengambil sistem pembaharuan dari manfaat pembangunan yang dilakukan. (Sunarti, 2019;52). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bisa disingkat BSPS adalah program dalam penanggulangan kemiskinan yang menuntut juga masyarakat ikut berpartisipasi didalamnya. Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya merupakan program pemerintah yang tercantum pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2018 tentang BPS tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu merehab rumah warga yang masuk kategori rumah tidak layak huni. Pada tahun 2023 Kabupaten Temanggung mendapatkan kuota dari pemerintah untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 713 rumah untuk 18 kecamatan dan 53 desa/kelurahan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung tahun 2019 Kecamatan Pringsurat menempati urutan keempat dengan jumlah 2.860 rumah pada kondisi rumah tempat tinggal tipe C (tipe terendah). Sehingga pada periode tahun 2023 Kecamatan Pringsurat mendapatkan kuota untuk implementasi Program BSPS.

Tabel 1  
Jumlah Penerima BSPS di Desa Kuppen

Nomor	Tahun	Jumlah BSPS diterima di Desa Kuppen
1	2018	30 rumah
2	2019	30 rumah
3	2022	5 rumah
4	2023	19 rumah

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2024*

Berdasarkan tabel diatas jumlah penerima di Kecamatan Pringsurat khususnya di Desa Kuppen dalam beberapa periode mengalami perubahan dan tidak setiap tahun mendapatkan jatah bantuan BSPS. Hal ini melatarbelakangi bagaimana penelitian ini akan melihat efektivitas dari program BSPS di Desa Kuppen, karena ada pengalaman dalam menerima bantuan seharusnya pihak desa mampu memaksimalkan sumber daya yang ada agar tercapainya tujuan sesuai dengan perencanaan awal. Dalam empat kesempatan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Pringsurat, selalu Desa Kuppen yang menerima bantuan tersebut. BSPS, yang merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak huni. Program ini sangat vital bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang karena keterbatasan sumberdaya, dimana banyak rumah yang masih belum memenuhi terstandarisasi kelayakannya. Namun, distribusi bantuan yang kurang merata ini telah menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat Kecamatan Pringsurat lainnya.

Dalam paparan penelitian terdahulu, masih disimpulkan bahwa kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum efektif di berbagai daerah di Indonesia. Meski program ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak huni, pelaksanaannya seringkali menemui berbagai kendala yang mengakibatkan tujuan program tidak tercapai secara optimal. Ketidakefektifan ini mencakup distribusi, ketercapaian hasil, keswadayaan, dan keberlanjutan program. Untuk memahami dan mengevaluasi efektivitas kebijakan ini, teori yang dikemukakan oleh Makmur

(2015) tentang efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Menurut Makmur, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan dengan baik. Ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Namun, masih terdapat gap dalam penelitian mengenai penerapan secara spesifik pada program BSPS di berbagai daerah, termasuk di Desa Kupon, Kecamatan Pringsurat. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada hasil dan dampak kebijakan, tanpa mengupas secara mendalam peran masyarakat, keberhasilan program, dan keberlanjutan dari program. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan mengevaluasi efektivitas kebijakan BSPS melalui perspektif peneliti. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan aplikatif untuk perbaikan kebijakan BSPS di masa mendatang. Pada tahun 2021, proses verifikasi tim penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mengalami perubahan signifikan. Tim verifikasi yang bertugas untuk menentukan kelayakan penerima bantuan kini melakukan penilaian berdasarkan kondisi rumah yang tidak layak huni. Proses verifikasi ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang kemudian bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung. Langkah ini bertujuan perpindahan tugas, pokok, dan fungsi guna memastikan bahwa bantuan benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Menurut James L. Gibson et al. (dalam Pasolong, 2013), efektivitas adalah pencapaian sasaran melalui upaya bersama, dan derajat pencapaian sasaran tersebut menunjukkan derajat efektivitas. Oleh karena itu, efektivitas dapat disimpulkan sebagai pencapaian tujuan dari program atau kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Mengenai efektivitas pemerintahan, (Ndraha, 2005) menyatakan bahwa efektivitas, yang secara abstrak didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan membagi hasil dengan tujuan. Tujuan, yang berasal dari visi abstrak, dapat dideduksi menjadi konkret sebagai sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, dan konsep hasil bersifat relatif, tergantung pada mata rantai dalam proses dan siklus pemerintahan di mana hasil didefinisikan.

Menurut Makmur (2015), persepsi tentang efektivitas berasal dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alami dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dalam kenyataannya, apa yang kita bayangkan sebelumnya mungkin bisa terjadi atau

tidak, namun jika kita sudah mengetahui dengan pasti bahwa sesuatu akan terjadi, akan lebih baik jika kita mempersiapkan diri, kelompok, atau organisasi untuk menghadapinya. Ini bukan hanya pada tingkat pemikiran saja, tetapi harus sampai pada tindakan dengan kebijakan yang tepat. Untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai kegiatan manusia, baik dalam organisasi pemerintahan maupun dunia bisnis menurut Makmur (2015), unsur-unsur efektivitas meliputi:

1. Ketepatan penentuan waktu. Waktu adalah penentu keberhasilan suatu kegiatan, karena jika tidak digunakan dengan tepat, kegiatan tersebut akan mengalami kerugian.
2. Ketepatan dalam penghitungan biaya. Penggunaan biaya yang tepat untuk kegiatan memastikan tidak ada kekurangan atau kelebihan pembiayaan hingga kegiatan selesai.
3. Ketepatan dalam pengukuran. Setiap kegiatan memiliki ukuran keberhasilan tertentu, dan jika pelaksanaan tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, ini mencerminkan tanggung jawab organisasi atau individu.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Kesalahan dalam pemilihan metode pekerjaan dapat mengurangi efektivitas.
5. Ketepatan dalam mencapai tujuan. Setiap organisasi akan berusaha mencapai tujuan yang disepakati sebelumnya, sehingga penentuan tujuan yang tepat sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama pada orientasi jangka panjang.
6. Ketepatan dalam menentukan sasaran. Sasaran lebih berorientasi pada jangka pendek yang bersifat operasional, jika sasaran ditetapkan tidak tepat maka akan menghambat berbagai pelaksanaan kegiatan.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Desa Kupa, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, untuk memahami lebih dalam dinamika dan efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai program tersebut. Informan yang diwawancarai meliputi aparat desa, penerima manfaat, serta pihak terkait lainnya yang berperan dalam pelaksanaan program. Peneliti harus melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang subjek penelitian mereka untuk mendapatkan data yang objektif. Wawancara ini dapat dilakukan selama observasi peneliti, tetapi juga perlu

melakukan wawancara khusus dengan beberapa partisipan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh peneliti.

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
2. Fasilitator Program BSPS
3. Aparat Desa Kupon
4. Penerima Bantuan Program BSPS

Teknik analisis data menggunakan teori Miles and Huberman dalam Hardani,dkk (2020), yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan dan mengorganisasikan data mentah, penyajian data membantu menggambarkan hasil temuan, dan penarikan kesimpulan dilakukan untuk menghasilkan interpretasi yang bermakna.

Abdussamad (2021) mengatakan bahwa validitas merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif dan didasarkan pada penentuan apakah temuan yang didapat akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan atau pembaca. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sementara triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan Program BSPS di Desa Kupon.

## **Hasil dan Pembahasan**

1. Meningkatkan kulaitas rumah layak huni

Hasil Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki atau membangun rumah layak huni. Berikut ini adalah hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023:

- a. Ketepatan pencapaian tujuam

Seluruh rumah yang termasuk dalam program BSPS pada periode ini telah terbangun 100%. Ini menunjukkan bahwa secara umum, program ini berhasil mencapai tujuan utamanya dalam hal penyediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Meskipun demikian, keberhasilan ini

harus dilihat lebih dalam dari sekadar jumlah rumah yang selesai dibangun, tetapi juga dari segi kualitas dan standar rumah tersebut. Komponen struktur meliputi pondasi, *sloof* atau balok bawah, kolom atau tiang, ring balok atau balok atas, dan rangka atap.

Pemenuhan Standar Keselamatan, Kecukupan Ruang, dan Kesehatan. Secara keseluruhan, rumah-rumah yang dibangun melalui program ini telah memenuhi standar keselamatan, kecukupan ruang, dan kesehatan yang ditetapkan. Rumah-rumah tersebut telah didesain sedemikian rupa untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penghuninya. Namun, terdapat catatan penting terkait bahan yang digunakan pada beberapa rumah, khususnya atap yang masih menggunakan asbes. Penggunaan asbes menjadi perhatian karena potensi bahayanya bagi kesehatan, terutama dalam jangka panjang. Asbes diketahui mengandung serat yang, jika terhirup, dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, termasuk penyakit pernapasan dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengganti asbes dengan bahan yang lebih aman dan ramah lingkungan demi keselamatan penghuni.

b. Ketepatan Waktu Pelaksanaan

Dari 19 rumah yang dibangun pada periode tahun 2023, sebagian besar telah diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun, terdapat satu rumah yang pembangunannya melebihi batas waktu yang ditentukan. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah teknis, kurangnya koordinasi, atau kendala cuaca yang tidak mendukung. Meskipun persentase keterlambatan ini relatif kecil, penting untuk memperhatikan aspek manajemen waktu dalam pelaksanaan program agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu di masa mendatang. Oleh karena itu, manajemen proyek yang baik dan koordinasi yang efektif antar berbagai pihak sangat diperlukan. Karena jika penyelesaian pembangunan rumah menjadi layak huni melebihi target waktu yang sudah ditentukan sebelumnya ini juga akan berdampak pada bagaimana pelaporan bagi fasilitator yang terlibat dalam proses ini.

c. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program BSPS tidak dapat dipastikan secara pasti karena tergantung pada pengajuan nama calon penerima manfaat yang harus diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat. Namun, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung menunjukkan inisiatif untuk menduplikasi dan mereplikasi program ini dengan menggunakan anggaran

daerah jika memungkinkan. Langkah ini bertujuan untuk memperluas cakupan bantuan dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya inisiatif lokal ini, diharapkan program BSPS dapat terus berjalan meskipun ada ketidakpastian dalam alokasi dana dari pemerintah pusat. Komitmen Dinas Kabupaten. Meskipun ada keterbatasan dalam kendali atas dana pusat, dinas kabupaten menunjukkan komitmen yang kuat terhadap program bantuan rumah tidak layak huni. Komitmen ini terlihat dari kesiapan mereka untuk melanjutkan program tersebut menggunakan anggaran daerah apabila sudah mencukupi. Ini adalah langkah penting yang menunjukkan tanggung jawab dan perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan mendesak warganya akan perumahan yang layak.

Kemitraan dan Kolaborasi. Selain perencanaan anggaran daerah, dinas kabupaten juga bisa menjajaki kemitraan dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini bisa membantu dalam mengumpulkan sumber daya tambahan, baik dalam bentuk dana maupun tenaga kerja sukarela. Kemitraan semacam ini juga bisa memberikan solusi inovatif dan efisien dalam pelaksanaan program perumahan, sehingga bisa mengurangi beban keuangan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri.

Hasil dari program BPS di Desa Kopen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung menunjukkan pencapaian yang cukup baik dalam hal pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan di masa depan. Pertama, perlu adanya penggantian material atap asbes dengan bahan yang lebih aman untuk memastikan kesehatan jangka panjang penghuni. Kedua, penting untuk meningkatkan manajemen waktu pelaksanaan agar seluruh pembangunan rumah dapat diselesaikan tepat waktu. Terakhir, inisiatif untuk menduplikasi program dengan anggaran daerah perlu didukung dan diperkuat agar keberlanjutan program ini dapat terjaga tanpa terlalu bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, program BPS di Desa Kopen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung telah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, namun ada beberapa area yang masih memerlukan perbaikan. Dengan upaya perbaikan yang terus-menerus, program ini memiliki potensi untuk menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

#### 1. Penerima manfaat BPS

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) di Kabupaten Temanggung bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki atau membangun rumah layak huni.



Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program, terdapat beberapa temuan penting terkait penerima manfaat dan proses verifikasi.

- a. Kepatuhan Terhadap Kriteria Pendapatan. Sebagian besar penerima manfaat program BPS di Kabupaten Temanggung telah memenuhi kriteria utama, yaitu memiliki pendapatan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Temanggung. Kriteria ini ditetapkan untuk memastikan bahwa bantuan perumahan disalurkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan finansial dalam membangun atau memperbaiki rumah layak huni. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya, proses seleksi telah sesuai dengan tujuan program dalam menjangkau kelompok sasaran yang tepat.
- b. Proses verifikasi calon penerima bantuan. Penerapan program yang sudah sesuai rencana di mana penerima manfaat sudah terdata "*by name by address*" merupakan langkah yang sangat penting dalam memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Pendekatan ini memungkinkan setiap penerima manfaat untuk teridentifikasi dengan jelas, sehingga penyaluran bantuan atau layanan dapat dilakukan tepat sasaran dan tepat waktu. Meskipun dalam pendekatan ini memiliki banyak keuntungan, pendekatan "*by name by address*" juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan *up-to-date*. Jadi diperlukannya kolaborasi antar instansi pemerintah agar data yang diperoleh adalah data yang terbaru (bisa berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial).

Dalam memilih calon penerima manfaat tentunya ada masalah yang dihadapi saat di lapangan pada proses verifikasi adalah ternyata penerima manfaat sudah lanjut usia (lansia). Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. (UU.No.13 Tahun 1998). Pengertian Lansia Tangguh Lansia tangguh adalah seseorang atau kelompok lanjut usia yang berumur 60 ke atas yang mempunyai ciri Sehat , Mandiri , Aktif dan Produktif. Memang lansia adalah termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, tapi dalam realitanya para lansia ini pasti kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Ketika merancang program bantuan untuk penerima manfaat yang sudah lanjut usia (lansia), perlu diperhatikan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan swadainya.

**Tabel 2**

**Penerima manfaat BSPS di Desa Kuppen Menurut Umur**

No.	Inisial nama	Umur
1	Zaenudin	74 tahun
2	Suyitno	76 tahun
3	Sucipto	49 tahun
4	Suradi	64 tahun

*Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2023*

- c. Catatan Mengenai Proses Verifikasi Penerima Manfaat. Meskipun penerima manfaat sudah memenuhi kriteria pendapatan, terdapat beberapa catatan penting terkait proses verifikasi. Salah satu masalah yang muncul adalah kurang mendalamnya proses verifikasi terhadap aset calon penerima manfaat. Sebagai contoh, ditemukan bahwa salah satu penerima manfaat memiliki lahan produktif yang cukup luas, yaitu sekitar 3.400 m<sup>2</sup>. Kondisi ini menunjukkan adanya bias dalam proses verifikasi, karena penerima manfaat tersebut memiliki aset yang dapat memberikan penghasilan tambahan dan mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan dalam mekanisme verifikasi calon penerima manfaat. Verifikasi yang lebih komprehensif harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak hanya pendapatan, tetapi juga kepemilikan aset dipertimbangkan dalam penentuan penerima manfaat. Pemeriksaan yang lebih mendetail mengenai aset produktif atau sumber penghasilan lain yang dimiliki oleh calon penerima manfaat perlu dilakukan agar bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran. Dengan melakukan verifikasi yang lebih mendalam, program BSPS akan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga bantuan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Kuppen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung.

2. Keswadayaan masyarakat

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kuppen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung tidak hanya

melibatkan pemerintah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat. Beberapa temuan penting terkait dengan partisipasi masyarakat, kepatuhan penerima manfaat, dan tantangan dalam pembiayaan swadaya muncul dalam melihat efektivitas program ini. Kemampuan Swadaya Beragam di Kalangan Penerima Manfaat. Selain itu, penerima manfaat menunjukkan kemampuan swadaya yang beragam dalam melaksanakan program. Beberapa penerima manfaat mampu secara swadaya karena memiliki tabungan material bangunan, seperti sisa bahan dari bangunan sebelumnya yang masih layak pakai. Ini menunjukkan adanya inisiatif dan kesiapan dari penerima manfaat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada demi menyukseskan pembangunan rumah mereka. Namun, tidak semua penerima manfaat memiliki kondisi yang sama.

- a. Ketidakpatuhan dalam Pelaksanaan Spesifikasi Teknis. Namun, terdapat kasus ketidakpatuhan dari salah satu penerima manfaat terkait ketentuan teknis pembangunan rumah. Atap rumah yang seharusnya tidak boleh dicor dak, malah dicor oleh penerima manfaat. Pengecoran atap ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh program, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kualitas bangunan. Ketidakpatuhan semacam ini dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan penghuni rumah dan menurunkan efektivitas program dalam mencapai standar pembangunan rumah layak huni.  
Namun ada pula sisi positif dari partisipasi masyarakat dengan Budaya Gotong Royong. Partisipasi masyarakat dalam program ini dinilai cukup baik, sebagian besar karena adanya tradisi gotong royong, khususnya dalam bentuk "sambatan." "Sambatan" adalah budaya kerja bersama yang sudah lama ada di masyarakat Jawa, di mana tetangga dan komunitas membantu satu sama lain dalam berbagai kegiatan, termasuk pembangunan rumah. Dalam konteks program BPS, "sambatan" memfasilitasi penerima manfaat yang kekurangan tenaga kerja atau dana untuk menyelesaikan pembangunan rumah mereka. Partisipasi melalui gotong royong ini bukan hanya mengurangi biaya tenaga kerja, tetapi juga mempererat ikatan sosial dalam komunitas, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan yang dicapai bersama.
- b. Kenyataan kontradiktif antara tujuan program yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan realitas di lapangan yang mengharuskan mereka sanggup swadaya dalam membangun rumah, seringkali menjadi tantangan besar dalam implementasi program. Ketika pemerintah atau organisasi lain meluncurkan program bantuan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tujuannya adalah untuk mengurangi beban finansial dan memberikan akses ke perumahan yang

layak. Namun, dalam proses realisasinya, banyak dari penerima manfaat dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan kontribusi finansial atau tenaga kerja yang tidak selalu mampu mereka penuhi. Beberapa penerima manfaat menghadapi kesulitan keuangan dan terpaksa menanggung hutang untuk menutupi kekurangan dana dalam proses pembangunan rumah. Hal ini menjadi beban tambahan bagi penerima manfaat, yang seharusnya mendapat bantuan untuk meringankan beban finansial mereka. Ketergantungan pada hutang dapat menurunkan efektivitas program, karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan bantuan tanpa menambah beban finansial bagi masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada langkah-langkah perbaikan seperti memperkuat pengawasan dan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap spesifikasi teknis program. Sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat memahami dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, penyediaan skema pembiayaan alternatif dengan bunga rendah atau tanpa bunga bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban hutang penerima manfaat. Dengan memperkuat aspek partisipasi masyarakat, mengatasi ketidakpatuhan, dan mendukung kemampuan swadaya penerima manfaat, Program BSPS di Kabupaten Temanggung dapat lebih efektif dan tepat sasaran, memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan dan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

### **Penutup**

Aparat desa memainkan peran penting dalam proses pengajuan nama penerima manfaat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Keterlibatan ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa bantuan perumahan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Program BSPS, yang digagas pemerintah, bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperbaiki atau membangun rumah layak huni melalui pemberian dana stimulan. Dana stimulan ini sangat berarti, mengingat banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akses finansial untuk membangun atau memperbaiki rumah. Selain dana stimulan, program ini juga mendorong partisipasi aktif penerima manfaat yang sering kali sudah memiliki tabungan berupa material bangunan. Partisipasi ini merupakan bagian penting dari konsep "swadaya," di mana masyarakat diharapkan memiliki kontribusi, baik dari segi tenaga, material, maupun biaya tambahan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mencoba mereplikasi program ini dengan memanfaatkan anggaran

kabupaten, untuk memperluas cakupan penerima manfaat. Keberhasilan program ini diukur melalui beberapa indikator, seperti kelayakan rumah yang dibangun, kepatuhan terhadap standar struktur, penyelesaian tepat waktu, dan kualitas yang sesuai spesifikasi teknik.

Namun, program ini menghadapi tantangan, terutama terkait keberlanjutannya. Program BSPS sangat bergantung pada alokasi dana dari pusat, sehingga dukungan dan komitmen pemerintah daerah sangat diperlukan. Selain itu, meskipun konsep swadaya diharapkan dapat meringankan beban finansial pemerintah, tidak semua masyarakat berpenghasilan rendah mampu memenuhi persyaratan ini. Salah satu tantangan utama dalam program ini adalah ketergantungan pada data penerima manfaat yang jelas dan akurat ("by name by address") untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan tepat waktu. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan desa juga diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan. Selain itu, kepatuhan penerima manfaat terhadap aturan program sering kali menjadi masalah. Penggunaan material yang berbahaya seperti asbes, atau penyalahgunaan bantuan untuk membangun rumah yang lebih besar, menunjukkan perlunya perbaikan dalam penilaian dan pengawasan. Untuk itu, perlu ada upaya lebih dalam memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai tujuan awal, yaitu membangun rumah layak huni yang sesuai standar kesehatan dan keamanan. Selain itu, tradisi gotong royong seperti "sambatan" dapat dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi dan kerjasama komunitas dalam pembangunan rumah. Dengan cara ini, masyarakat bisa saling membantu dan mengurangi beban finansial penerima manfaat.

Pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperbaiki pengelolaan program melalui penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih transparan dan akuntabel. Pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan, termasuk aparat desa, dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas program. Pada akhirnya, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan program BSPS, komitmen pemerintah daerah dan pusat untuk terus memperbaiki proses, serta dukungan dari masyarakat, sangat penting untuk memastikan program ini benar-benar mencapai tujuan utamanya, yaitu menyediakan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang diberikan:

- a. Peningkatan Peran Aparat. Kembangkan sistem verifikasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa data penerima manfaat valid dan akurat. Serta mengajak partisipasi dari Masyarakat, proses pelibatan

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas.

- b. Mendorong pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung replikasi program BSPS. Kolaborasi Antar Lembaga: Tingkatkan koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan lembaga terkait lainnya untuk memperluas cakupan bantuan.
- c. Gotong Royong: Promosikan dan fasilitasi kegiatan gotong royong seperti "sambatan" untuk membantu penerima manfaat yang kesulitan.
- d. Perbarui kriteria seleksi penerima manfaat agar lebih ketat dan sesuai dengan kondisi di lapangan yang dapat menjangkau kepemilikan asset bagi calon penerima manfaat saat proses verifikasi.
- e. Penanganan Isu Kesehatan dan Keselamatan, Fasilitasi penggantian atap asbes dengan bahan yang lebih aman dan ramah lingkungan.
- f. Pencegahan Hutang, Sediakan skema bantuan finansial tanpa bunga atau dengan bunga rendah untuk mencegah penerima manfaat terjerat hutang. Berikan pelatihan perencanaan keuangan kepada penerima manfaat untuk membantu mereka mengelola dana bantuan dengan lebih efektif
- g. Adanya penelitian lanjutan tentang bantuan stimulan perumahan swadaya dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, karena program kebijakan ini memuat adanya keswadayaan dari penerima manfaat. Sehingga ada alternatif perspektif lain dari pelaksanaan program kebijakan ini.

Saran-saran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program BSPS serta memastikan bantuan mencapai sasaran dengan tepat dan adil.

## Referensi

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir media press Badan Pusat Statistic Temanggung. <https://temanggungkab.bps.go.id/statictable/2016/03/16/131/bangunan-tempat-tinggal-dirinci-menurut-kecamatan-dan-tipe-bangunan-di-kabupaten-temanggung-2014.html> diakses pada 10 Agustus 2020
- Laman.temanggungkab.go.id.(2019, 22 Februari). 75 Desa dan Kelurahan Mendapat Bantuan Swadaya. diakses pada 19 Maret 2020, dari <https://laman.temanggungkab.go.id/berita/detail/201902/4292/75-desadan-kelurahan-mendapat-bantuan-perumahan-swadaya.html>
- Hardani, H. A., Ustiawaty, J., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sykmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Makmur.(2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagan Pengawasan*. Bandung : Refika Aditama
- Ndraha, Taliziduhu. (2005). *Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Sunarti (2019). *Perumahan dan Permukiman*. Semarang : UNDIP Press.Ebook
- Surat Edaran Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang Peutnjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya